

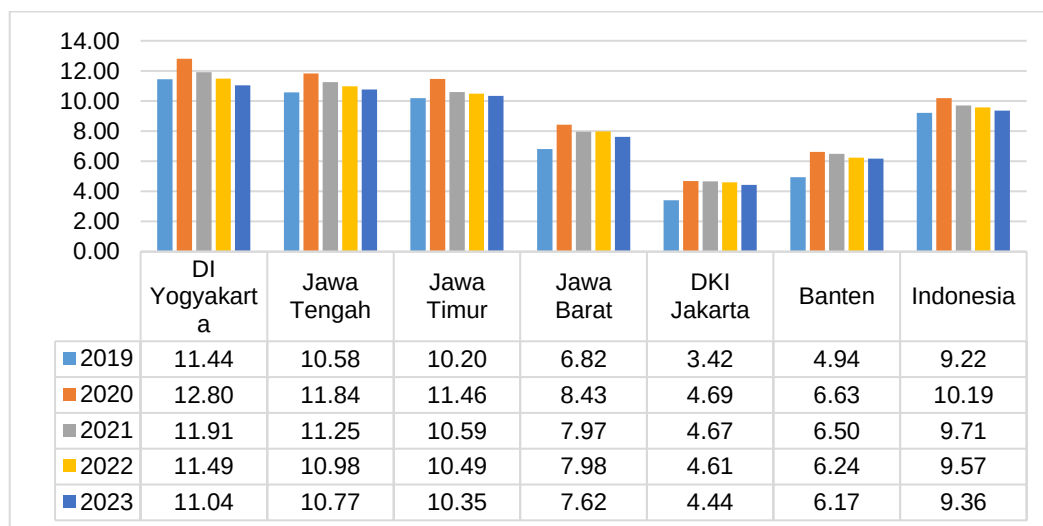
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan pembangunan ekonomi adalah usaha yang terus-menerus dilakukan oleh setiap daerah di suatu negara. Kendala kemiskinan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dialami oleh hampir seluruh negara, termasuk Indonesia (Alifah & Imaningsih, 2023). Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang dalam tahap tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya atau merupakan kegagalan seseorang dalam memenuhi hak-hak dasar hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap ideal dalam kehidupan (Dian & Indira, 2024). Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan besar dalam perekonomian Indonesia yang harus diminimalisir dampaknya karena dapat memicu berbagai masalah sosial dan akan mengakibatkan kesulitan pada tercapainya kesejahteraan masyarakat (Amelia *et al.*, 2024). Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki proporsi kemiskinan tinggi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Salsabilla *et al.*, 2019).

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta (2023), bahwa penduduk DI Yogyakarta pada tahun 2023 berjumlah sebesar 4.073.907 jiwa, dengan luas wilayah sebesar 3.170,65 km² serta nilai total penduduk miskin sebesar 448,47 ribu orang. Kemiskinan adalah salah satu masalah yang ditimbulkan oleh padatnya jumlah penduduk dan terbatasnya luas lahan di wilayah tersebut (Krisna & Hakim, 2023). Kondisi kemiskinan tersebut digambarkan dalam data persentase penduduk miskin dalam rentang waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2019–2023. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menempati peringkat pertama kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa dibandingkan dengan lima

provinsi lainnya dan persentase penduduk miskin nasional, sedangkan jika diurutkan dengan keseluruhan provinsi di Indonesia persentase penduduk miskin di Provinsi DIY berada pada urutan ke dua belas dengan persentase sebesar 11,04 persen pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, 2024).



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Di Pulau Jawa Dan Indonesia tahun 2019-2023 (persen)

Digambarkan dari data kemiskinan keseluruhan provinsi di Pulau Jawa, pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yaitu 11,04 persen pada tahun 2023. Angka tersebut bahkan melampaui persentase penduduk miskin nasional atau Indonesia dengan nilai sebesar 9,36 persen pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Dengan luas wilayah yang tidak terlalu luas dan kepadatan penduduk yang cukup padat, ditambah persentase penduduk miskin yang tinggi menandakan bahwa terjadi persoalan pembangunan ekonomi yang sangat memprihatinkan di daerah tersebut (Krisna & Hakim, 2023). Fokus utama pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini adalah mengatasi kemiskinan guna upaya pembangunan ekonomi, karena hingga saat ini kesejahteraan masyarakat masih dianggap belum

merata dengan dibuktikannya angka persentase penduduk miskin yang masih tinggi (Khoirudin, 2022). Menurut penelitian yang telah dilakukan di Provinsi DIY dengan menganalisis faktor dan penyebab kemiskinan wilayah tersebut, salah satunya penelitian oleh Khoirudin & Nasir (2022) dan Alifah & Imaningsih (2023) yang menyatakan bahwa tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi DIY disebabkan oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut seperti rendahnya upah minimum dan pendapatan masyarakat, terbatasnya lapangan kerja, serta lambatnya penyerapan tenaga kerja. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan pekerjaan, pendidikan dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, serta belum meratanya investasi industri dan infrastruktur juga turut memperparah kondisi ini. Serta standar hidup layak yang rendah, dan penyaluran bantuan sosial yang belum tepat sasaran semakin memperkuat lingkaran kemiskinan di DIY.

Maka dari itu, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu terus mengupayakan optimalisasi langkah guna mengatasi masalah kemiskinan ini dengan mengevaluasi lebih mendalam berbagai indikator yang dianggap berkontribusi terhadap kemiskinan di wilayah tersebut (Nurmalita, 2018). Sehingga, pentingnya penelitian ini dilakukan di Provinsi DIY didasarkan pada tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa dan angka nasional. Dan adanya penelitian ini, dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dianggap berperan penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Provinsi DIY. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah kemiskinan sehingga masyarakat DIY mampu mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi.

Salah satu ukuran yang dianggap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, diartikan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka kemiskinan di suatu wilayah akan turun (Evita, 2022). Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan perekonomian suatu daerah dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan jumlah pekerja, sehingga nantinya akan menyebabkan pengangguran dan kemiskinan menurun (Budhijana, 2019). Pada studi empiris oleh Hanifah (2021) dan Nurmalita (2018) menyatakan tingkat kemiskinan secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

Tabel 1.1 Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2023 (persen)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
DI Yogyakarta	6,59	-2,67	5,58	5,15	5,07
Kulon Progo	13,49	-3,45	4,37	6,58	5,65
Bantul	5,53	-1,65	5,00	5,19	5,06
Gunung Kidul	5,34	-0,68	5,31	5,37	5,04
Sleman	6,48	-4,05	5,61	5,15	5,09
Kota Yogyakarta	5,96	-2,42	5,16	5,12	5,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

Parameter pertumbuhan ekonomi setiap kota dan kabupaten di Daerah Istimewa Provinsi Yogyakarta dipaparkan pada tabel 1.1, dalam kurun waktu 2019-2023 pertumbuhan ekonomi berfluktuasi hingga pada tahun 2023 sebesar 5,07 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kabupaten Gunung Kidul memiliki tingkat pertumbuhan paling lambat (5,04 persen), sedangkan Kabupaten Kulon Progo memiliki pertumbuhan tertinggi (5,65 persen) pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, 2024). Maka, terjadi penurunan kinerja

perekonomian pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang digambarkan pada penurunan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut (Nur, 2018).

Tabel 1.2 Perbandingan Laju PDRB Dan Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2023

Tahun	Laju PDRB	Persentase Penduduk Miskin
2019	6.59	11.44
2020	-2.67	12.80
2021	5.58	11.91
2022	5.15	11.49
2023	5.07	11.04

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

Dibuktikan dari tabel 1.2 bahwa statistik pertumbuhan PDRB dan proporsi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang hidup dalam kemiskinan mengalami fluktuasi. Pada laju PDRB terjadi fluktuasi dengan nilai terendah pada tahun 2020 sebesar -2,67 persen. Sementara itu, data persentase penduduk miskin menunjukkan fluktuasi dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 12,80 persen. Pada tahun 2023 data laju PDRB dan persentase penduduk miskin mempunyai kondisi yang sama yaitu mengalami penurunan. Penurunan laju PDRB dan peningkatan persentase penduduk miskin menandakan suatu kondisi ekonomi daerah yang tidak baik, jika ditelaah lebih dalam terjadi fenomena pandemi COVID-19 di tahun 2023 yang mengganggu aktivitas ekonomi domestik dan global (Hanifah, 2021). Sehingga di tahun 2023 ditemukan suatu fenomena penurunan pertumbuhan ekonomi diiringi dengan penurunan persentase penduduk miskin.

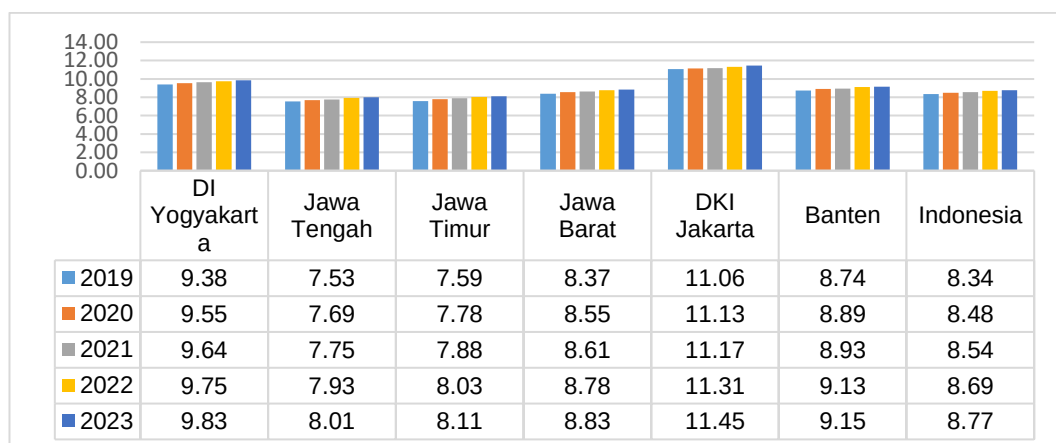
Situasi tersebut bertentangan dengan teori *trickle-down effect*, yang berpendapat bahwa salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, dengan gagasan bahwa kemiskinan akan menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat (Nur, 2020). Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan atau gap antara teori dan realitas, menurut

teori tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif, maknanya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan (Nurmalita, 2018). Kesenjangan ini melandasi penelitian untuk menganalisis secara menyeluruh kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan indikator lain yang secara teoritis dapat memengaruhi tingkat kemiskinan guna hasil yang lebih komprehensif.

Kemiskinan di suatu wilayah juga dapat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, dengan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan daya beli (Salsabilla *et al.*, 2019). Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menandakan perbaikan kualitas hidup dan perluasan akses terhadap layanan dasar, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kemiskinan (Nasri *et al.*, 2024). Menurut Badan Pusat Statistik (2024) pada tahun 2023, Provinsi DIY menempati posisi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta dengan besaran angka IPM tinggi melebihi besaran IPM Indonesia atau nasional. Menurut Dian & Indira (2024) bahwa, wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi umumnya menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah karena disebabkan oleh kemampuan penduduk yang lebih besar dalam memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang tersedia. Penelitian sebelumnya telah dilakukan di Provinsi DIY salah satunya oleh Suropto & Subayil (2020) menyatakan bahwa IPM memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi DIY. Namun pada kondisi yang ada di Provinsi DIY tingginya angka IPM juga diimbangi dengan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Sehingga kondisi tersebut didapatkan suatu gap atau fenomena yang menarik untuk

dipelajari secara komprehensif terkait hal yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Penelitian ini akan lebih spesifik fokus terhadap keseluruhan indikator-indikator yang ada dalam indeks pembangunan manusia (IPM), yaitu penelitian ini secara spesifik menguji pengaruh masing-masing indikator penyusun IPM, yaitu pendidikan dan kesehatan secara terpisah agar mendapatkan hasil yang lebih spesifik dan komprehensif.

Menurut Nurkse (1953) berargumen pada teori lingkaran kemiskinan, bahwa kemiskinan disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk menyebabkan berkurangnya investasi masyarakat di sektor pendidikan dan kesehatan sehingga akan menghambat perkembangan indeks pembangunan manusia (Salsabilla *et al.*, 2019). Pendidikan memegang peran utama dalam mengurangi kemiskinan, mengingat akan membantu individu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru (Nurmalita, 2018). Kondisi pendidikan umumnya dinilai berdasarkan parameter rata-rata lama sekolah, yang menggambarkan durasi pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang (Kevin *et al.*, 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Gambar 1.2 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Nasional dan Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (tahun)

Pada gambar 1.2 menunjukkan dari enam provinsi di Pulau Jawa, rata-rata lama sekolah paling tinggi selama tahun 2019-2023 merupakan DKI Jakarta

pada urutan pertama dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada urutan kedua (Badan Pusat Statistik, 2024). Durasi lama sekolah rata-rata yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta naik setiap tahunnya bahkan nilainya lebih tinggi sebesar 9,83 tahun dari nasional atau Indonesia sebesar 8,77 tahun pada tahun 2023, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pembangunan manusia melalui bidang pendidikan berjalan dengan baik (Candrawati *et al.*, 2021). Namun meskipun nilai rata-rata lama pendidikan tinggi dan melebihi nilai lama pendidikan rata-rata nasional, akan tetapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat penduduk miskin masih tinggi dan bahkan diposisi tertinggi diantara lima provinsi lain di Pulau Jawa dan persentase nasional. Beberapa penelitian yang sama dengan hasil yang berbeda telah dilakukan di Provinsi DIY, dengan menguji pengaruh pendidikan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di wilayah tersebut. Adanya perbedaan hasil dari studi empiris yang dilakukan oleh Khoirudin & Nasir (2022), yang menunjukkan lamanya waktu pendidikan berkorelasi negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2012-2019, yang artinya bahwa peningkatan lama waktu pendidikan akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan. Sedangkan hasil penelitian menurut Nurmalita (2018), lama sekolah rata-rata tidak berkorelasi dengan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2004-2014.

Selain rata-rata lama sekolah, adapun indikator lain yang lebih spesifik dalam menggambarkan kondisi pendidikan di suatu wilayah. Indikator angka partisipasi murni (APM) merepresentasikan persentase anak usia sekolah yang terdaftar dan aktif dalam jenjang pendidikan yang relevan dengan kelompok usianya. Indikator ini mencerminkan efektivitas dan akurasi sistem pendidikan dalam menjangkau populasi usia sekolah yang seharusnya, sehingga memiliki

gambaran yang lebih spesifik dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah yang bersifat lebih umum (Pranizty & Septiani, 2021). APM digunakan untuk mengukur keterlibatan anak-anak usia sekolah dalam pendidikan formal sesuai usianya. Semakin tinggi APM, maka semakin banyak anak yang bersekolah di tingkat yang tepat. Nilai APM idealnya 100%, tetapi bisa lebih dari itu jika ada siswa dari luar daerah yang bersekolah di wilayah tersebut. Hal tersebut sering terjadi di kota besar karena fasilitas pendidikan yang lebih lengkap (Safira & Wibowo, 2021).

Tabel 1.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2023 (persen)

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
SD	99.53	99.59	99.44	99.43	99.36
SMP	84.04	83.98	83.62	85.28	85.62
SMA	70.49	70.98	71.42	74.50	76.37

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang digambarkan di tabel 1.3, angka partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan di Provinsi DIY menunjukkan tren yang positif selama periode 2019 hingga 2023. Pada jenjang SD, APM tercatat sangat tinggi dan stabil di atas 99 persen, mencerminkan hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah mengakses pendidikan. Sementara itu, APM jenjang SMP mengalami sedikit fluktuasi, namun tetap menunjukkan peningkatan dari 83,62 persen pada tahun 2021 menjadi 85,62 persen pada tahun 2023. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada jenjang SMA, di mana APM naik dari 70,49 persen pada tahun 2019 menjadi 76,37 persen pada tahun 2023. Meskipun demikian, angka partisipasi pada jenjang SMA masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jenjang SD dan SMP, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan pendidikan hingga tingkat menengah atas. Rendahnya APM SMA ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya

motivasi melanjutkan sekolah, atau kurangnya aksesibilitas terhadap pendidikan menengah atas, khususnya di wilayah pinggiran atau pedesaan. Kondisi ini menjadi persoalan krusial karena pendidikan pada jenjang SMA memiliki peran penting dalam membentuk kesiapan individu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya APM SMA, agar kebijakan yang diambil ke depan lebih tepat sasaran dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan di tingkat ini.

Menurut penelitian oleh Amaliah (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara APM terhadap tingkat kemiskinan, artinya kenaikan APM akan dapat menurunkan kemiskinan. Sedangkan, di Provinsi DIY terdapat fenomena rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA. Kondisi tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan risiko kemiskinan, terutama di kalangan remaja usia produktif. Ketika banyak anak usia 16–18 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA, mereka kehilangan kesempatan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang menjadi dasar untuk mengakses pekerjaan formal dengan pendapatan yang stabil (Oktaviana, 2022). Tanpa ijazah SMA, peluang mereka untuk diterima di pasar kerja yang lebih kompetitif menjadi terbatas, sehingga mendorong mereka masuk ke sektor informal dengan upah rendah, kondisi kerja tidak layak, dan tanpa perlindungan sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini mempersulit mobilitas sosial dan memperbesar kemungkinan terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya (Hikmah *et al.*, 2010). Oleh karena itu, peningkatan APM SMA bukan hanya perihal akses pendidikan, melainkan juga strategi penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara struktural.

Adapun penelitian di Negara Filipina yang dilakukan oleh Ducanes & Ocampo (2019), yang menganalisis terkait dampak implementasi program Senior High School (SHS) terhadap partisipasi sekolah pelajar berusia 16 hingga 17 tahun di Filipina. Pemerintah Filipina berupaya mengurangi kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan, khususnya di tingkat menengah. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peningkatan partisipasi sekolah menengah akhir (SMA) di Filipina justru menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini bertentangan dengan tujuan utama pendidikan sebagai alat pengentasan kemiskinan, yang menjadi fokus utama studi ini. Meskipun partisipasi sekolah meningkat, kemiskinan tidak otomatis menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, rendahnya kualitas pendidikan, serta dominasi sektor informal yang tidak mampu menyerap lulusan dengan upah layak. Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan perlu diimbangi dengan perbaikan kualitas pendidikan dan isi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, agar benar-benar bisa membantu mengurangi kemiskinan secara nyata. Selain itu penelitian serupa di Negara Pakistan dilakukan oleh Pervez (2014), yang menyatakan bahwa pendidikan memainkan peran krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan di Pakistan. Studi ini secara spesifik menyoroti bahwa tingkat melek huruf (*literacy rate*) dan tingkat pendaftaran bruto di jenjang pendidikan menengah/SMA (*Gross Enrollment Secondary*) memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka panjang. Artinya, semakin banyak orang yang melek huruf dan semakin tinggi partisipasi siswa di jenjang SMA, semakin besar pula penurunan angka kemiskinan di negara tersebut. Secara keseluruhan, temuan tersebut menggarisbawahi pentingnya

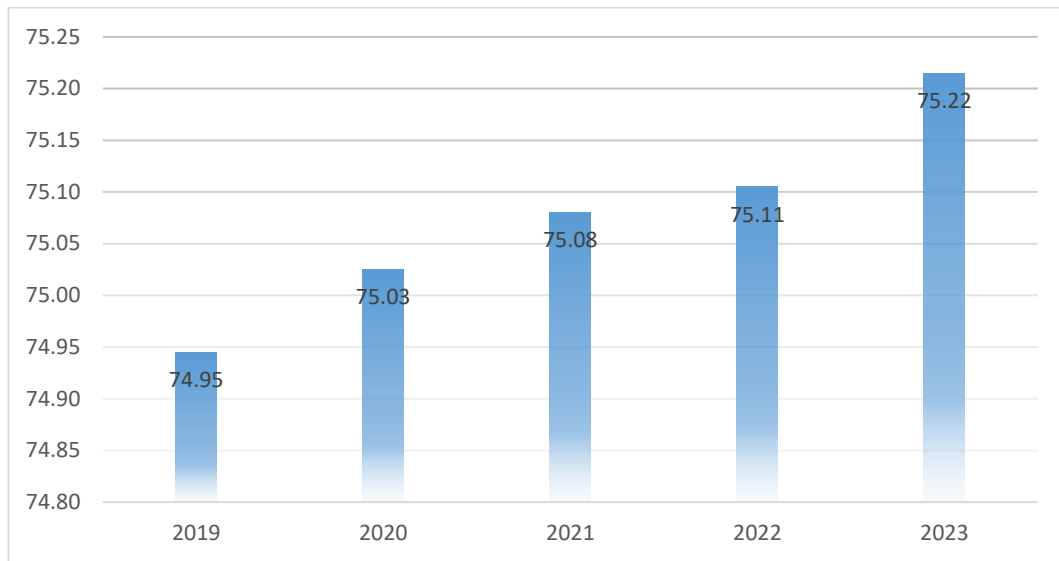
investasi berkelanjutan pada kuantitas dan kualitas pendidikan sebagai strategi fundamental untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Pakistan.

Penelitian yang sama dengan hasil yang berbeda telah dilakukan di Provinsi DIY, dengan menguji pengaruh pendidikan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di wilayah tersebut. Adanya perbedaan hasil dari studi empiris yang dilakukan oleh Khoirudin & Nasir (2022), yang menunjukkan lamanya waktu pendidikan berkorelasi negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2012-2019, yang artinya bahwa peningkatan lama waktu pendidikan akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan. Sedangkan hasil penelitian menurut Nurmalita (2018), lama sekolah rata-rata tidak berkorelasi dengan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2004-2014. Beberapa penelitian sebelumnya di Provinsi DIY untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah tersebut, menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai indikator yang menggambarkan tingkat pendidikan yang hanya mencerminkan lamanya pendidikan yang sudah ditempuh oleh penduduk usia dewasa, sehingga kurang menggambarkan kondisi partisipasi pendidikan anak usia sekolah saat ini. Sehingga, pemilihan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SMA sebagai indikator pendidikan didasarkan pada kenyataan bahwa APM pada jenjang tersebut merupakan yang paling rendah dibandingkan jenjang SD dan SMP di Provinsi DIY.

Selain itu, adanya fenomena ketimpangan partisipasi pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi perhatian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun APM pada jenjang SD dan SMP di provinsi ini tergolong tinggi, APM jenjang SMA justru tercatat sebagai yang paling

rendah. Di sisi lain, tingkat kemiskinan di Provinsi DIY berada pada posisi pertama kemiskinan tertinggi di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Ketidakseimbangan ini menimbulkan dugaan bahwa keterbatasan akses terhadap pendidikan menengah dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan. Temuan serupa juga ditemukan dalam studi internasional, seperti penelitian di Filipina yang menunjukkan bahwa peningkatan APM pendidikan menengah tidak secara otomatis menurunkan kemiskinan, bahkan ditemukan memiliki pengaruh positif terhadapnya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan tanpa didukung oleh kualitas dan relevansi terhadap kebutuhan dunia kerja belum mampu menjadi instrumen efektif dalam menurunkan kemiskinan (Ducanes & Ocampo, 2019). Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian terkait pengaruh APM jenjang SMA dan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY, guna memahami lebih jauh apakah perlu adanya perbaikan dalam akses maupun mutu pendidikan menengah sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Selain pendidikan, kesehatan dianggap sebagai tingkat kehidupan minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu (Fitri *et al.*, 2023). Kesehatan dianggap mempunyai keterkaitan kuat dengan kemiskinan, karena tingkat kesehatan dianggap mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Nurmalita, 2018). Indikator harapan hidup suatu daerah adalah salah satu parameter yang digunakan untuk menilai seberapa baik kesehatan berkembang (Santoso, 2023). Perkiraan jumlah rata-rata tahun yang dapat dijalani seseorang sepanjang hidupnya adalah yang dimaksud angka harapan hidup (Fitri *et al.*, 2023).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

Gambar 1.3 Angka Harapan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2023 (tahun)

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.3, tingkat harapan hidup daerah Istimewa Yogyakarta meningkat setiap tahun dari tahun 2019-2023 (Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, 2024). Peningkatan angka harapan hidup tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang memiliki keadaan yang baik dan meningkat di daerah tersebut (Dian, 2024). Peningkatan angka harapan hidup ini akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akan berdampak terhadap penurunan persentase kemiskinan (Adriana, 2020).

Tabel 1.4 Perbandingan Angka Harapan Hidup Nasional Dan Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (tahun)

Tahun	DI Yogyakarta	Jawa Tengah	Jawa Timur	Jawa Barat	DKI Jakarta	Banten	Indonesia
2019	74.95	74.25	71.23	72.92	72.82	69.89	71.39
2020	75.03	74.41	71.35	73.15	72.95	70.01	71.53
2021	75.08	74.52	71.43	73.38	73.06	70.07	71.61
2022	75.11	74.62	71.76	73.63	73.34	70.41	71.88
2023	75.22	74.79	72.16	74.10	73.75	70.82	72.18

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Harapan hidup paling tinggi yaitu di Daerah Istimewa Provinsi Yogyakarta dengan nilai di tahun 2023 senilai 75,22 tahun dan melebihi angka harapan hidup

lima provinsi lainnya di Pulau Jawa dan nilai nasional pada tahun 2023 sebesar 72,18 tahun, yang ditunjukkan pada tabel 1.4 (Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tingkat kesehatan berada pada kondisi yang baik (Aprillia & Sugiharti, 2022). Meskipun pada urutan pertama terbaik di Pulau Jawa bahkan melebihi nilai angka harapan hidup nasional, tetapi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di pulau Jawa bahkan melampaui rata-rata nasional. Sehingga terdapat fenomena menarik bahwa tingginya angka harapan hidup masih diimbangi dengan tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian oleh Jannah (2023), berargumen bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat berkorelasi negatif dengan harapan hidup, yang berarti peningkatan angka harapan hidup akan menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, studi empiris oleh Ika (2022) menyatakan bahwa indeks harap hidup memiliki pengaruh positif dengan tingkat kemiskinan Di Kabupaten Tana Toraja, yang artinya kenaikan angka harapan hidup akan menaikkan tingkat kemiskinan. Kemudian studi empiris oleh Candrawati (2021) menyatakan bahwa angka harapan hidup tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen periode 2010-2019. Maka ditemukan suatu celah penelitian dari perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang menjadikan alasan bagi peneliti untuk menambahkan variabel independen kesehatan melalui indikator angka harapan hidup untuk dapat dikembangkan lebih lanjut guna menganalisis pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan variabel pendidikan dan kesehatan pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh terpisah dari indikator pendidikan dan

kesehatan yang merupakan bagian dari IPM terhadap tingkat kemiskinan. Pendekatan ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih detail.

Penelitian ini juga mempertimbangkan pengaruh upah terhadap kemiskinan, yang relevan dengan teori *vicious circle of poverty* yang dikemukakan oleh Nurkse (1953). Menurut teori lingkaran kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurkse (1953) dalam Jhingan (2008), bahwa tingkat upah yang rendah merupakan salah satu manifestasi dari rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah ini disebabkan oleh kurangnya modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia (termasuk di dalamnya tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah), serta pasar yang terbatas. Upah rendah selanjutnya melemahkan daya beli, memperkecil pasar, dan menurunkan minat investasi. Siklus ini terus berputar, di mana upah rendah menyebabkan kemiskinan, dan kemiskinan membuat upah sulit naik karena hasil kerja dan permintaan yang sedikit. Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan kebijakan upah minimum yang ditetapkan di kabupaten dan kota dalam suatu provinsi (Chairunnisa, 2022). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, dapat melalui kebijakan upah minimum (Nasri *et al.*, 2024).

Tabel 1.5 Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi DIY (UMP)	Rp1.570.923	Rp1.704.608	Rp1.765.000	Rp1.840.915	Rp1.981.782
Kota Yogyakarta	Rp1.846.400	Rp2.004.000	Rp2.069.530	Rp2.153.970	Rp2.324.775
Kabupaten Sleman	Rp1.701.000	Rp1.846.000	Rp1.903.500	Rp1.968.445	Rp2.159.519
Kabupaten Bantul	Rp1.649.800	Rp1.790.500	Rp1.850.500	Rp1.905.000	Rp2.066.365
Kabupaten Kulon Progo	Rp1.613.200	Rp1.750.500	Rp1.805.000	Rp1.900.000	Rp2.048.734
Kabupaten Gunung Kidul	Rp1.571.000	Rp1.705.000	Rp1.770.000	Rp1.900.000	Rp2.043.219

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

Bahwa terjadi kenaikan setiap tahunnya pada nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), ditunjukkan pada tabel 1.5. Dengan besaran UMP di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1.981.782 di tahun 2023 (Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, 2024). Terjadinya kenaikan tersebut mencerminkan bahwa adanya peningkatan biaya sepanjang kuartal yang seiring dengan terjadinya peningkatan mobilitas sosial serta kenaikan tingkat pendapatan yang diakibatkan oleh upah (Alifah & Imaningsih, 2023). Kemudian pada besaran UMK di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga merasakan peningkatan setiap tahunnya. Dengan besaran upah minimum paling tinggi pada Kota Yogyakarta dan besaran paling rendah pada Kabupaten Gunung Kidul.

Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota tersebut menjadi salah satu langkah oleh pemerintah guna mengentaskan kemiskinan melalui upaya mensejahterakan masyarakat dengan membuat kebijakan pada upah guna menjamin tenaga kerja akan bekerja secara produktif dan akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya (Mudawanah, 2022). Upaya peningkatan upah minimum dilakukan guna menyesuaikan dengan kondisi nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang terus meningkat, karena apabila kenaikan upah minimum tidak sebanding dengan KHL maka akan berdampak pada peningkatan kemiskinan pada suatu daerah (Sari, 2021).

Tabel 1.6 Perbandingan Upah Minimum Provinsi Pada Enam Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (rupiah)

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	Rp3.940.973	Rp4.276.349	Rp4.276.349	Rp4.641.854	Rp4.901.798
Jawa Barat	Rp1.668.372	Rp1.810.351	Rp1.810.351	Rp1.841.487	Rp1.986.670
Banten	Rp2.267.990	Rp2.460.996	Rp2.460.996	Rp2.501.203	Rp2.661.280
Jawa Tengah	Rp1.605.396	Rp1.742.015	Rp1.798.979	Rp1.812.935	Rp1.958.169
DI Yogyakarta	Rp1.570.923	Rp1.704.608	Rp1.765.000	Rp1.840.915	Rp1.981.782
Jawa Timur	Rp1.630.059	Rp1.768.777	Rp1.868.777	Rp1.891.567	Rp2.040.244

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Perbandingan UMP (Upah Minimum Provinsi) pada enam provinsi di Pulau Jawa periode 2019-2023 ditunjukkan pada tabel 1.6 di atas. Besaran upah minimum paling tinggi terdapat pada Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.901.798 pada tahun 2023. Sedangkan besaran upah minimum paling rendah pada Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.958.169 kemudian disusul oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1.981.782 pada tahun 2023. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir pada enam provinsi di Pulau Jawa upah minimum terus meningkat. Peningkatan upah minimum tersebut dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan upah yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (Ningsih *et al.*, 2023). Dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa, Daerah Istimewa Provinsi juga merupakan salah satu provinsi dengan besaran upah minimum yang rendah posisi kedua setelah Jawa Tengah.

Meskipun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2023 persentase penduduk miskin mengalami penurunan, namun peningkatan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah masih belum berhasil menggeser posisi pertama daerah tersebut dengan persentase kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Fenomena tersebut menjadi suatu kondisi yang dapat dikembangkan menjadi suatu penelitian lebih lanjut karena terdapat peningkatan nilai upah masih diimbangi dengan tingginya persentase kemiskinan di daerah tersebut. Pada studi empiris oleh Rahmawati & Sebayang (2023) mendapatkan hasil bahwa upah minimum memiliki korelasi negatif dengan kemiskinan ekstrem di Indonesia, yang artinya kenaikan upah minimum akan menurunkan tingkat kemiskinan. Sedangkan studi empiris yang dilakukan oleh Hanifah (2021) upah minimum memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Lamongan, yang artinya

peningkatan upah minimum akan meningkatkan kemiskinan. Adanya perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya menandakan bahwa pengaruh upah minimum akan berbeda sesuai dengan kondisi wilayah daerah setempat (Hanifah, 2021). Sehingga adanya inkonsisten hasil penelitian sebelumnya juga menjadi celah untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dinamika teori *vicious circle poverty* oleh Nurkes (1953) berlaku dalam konteks pengaruh upah terhadap kemiskinan di wilayah Provinsi DIY.

Adapun penelitian yang sama di lakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya yang dilakukan oleh Suropto & Subayil (2020) di daerah yang sama yang menghasilkan bahwa pendidikan, pertumbuhan ekonomi, serta indeks pembangunan manusia memiliki korelasi negatif yang signifikan terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2017. Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Dian & Indira (2024) yang menyatakan bahwa upah minimum dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019-2023. Dari beberapa contoh penelitian yang dilakukan di Yogyakarta tersebut menunjukkan perbedaan hasil pada setiap periode tahun penelitian, penelitian sebelumnya memiliki beberapa keterbatasan, yaitu hanya melihat IPM secara keseluruhan tanpa membahas lebih detail tentang pendidikan dan kesehatan, menggunakan data yang hanya dari tingkat provinsi sehingga kurang menggambarkan kondisi di kabupaten atau kota. Adanya keterbatasan tersebut, dapat menjadi celah atau keterbaruan pada penelitian ini guna mendapatkan hasil yang lebih luas dan komprehensif.

Dengan demikian, kemiskinan menjadi permasalahan yang masih menjadi persoalan rumit yang terus pemerintah lakukan upaya-upaya untuk mengatasinya

(Krisna & Hakim, 2023). Dibuktikan dengan berbagai program-program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang tujuannya untuk mengatasi kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat (Amelia *et al.*, 2024). Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan adalah dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat ialah Program Keluarga Harapan (PKH), program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin (Budhijana, 2019). Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2027, dipaparkan upaya pemerintah daerah tersebut dalam mengentaskan kemiskinan dengan melakukan pengurangan tingkat kemiskinan dengan fokus pada pengurangan tanggungan biaya hidup masyarakat miskin melalui bantuan sosial serta menciptakan program pemberdayaan guna meningkatkan produktivitas sebagai upaya meningkatkan kapasitas perekonomian (Bappeda Provinsi DI Yogyakarta, 2023)

Meskipun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, persentase kemiskinan di provinsi ini justru menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan kondisi empiris. Berdasarkan teori, IPM yang tinggi dengan indikator utama pendidikan dan kesehatan semestinya mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, dalam konteks DIY, indikator kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup (AHH) menunjukkan nilai tertinggi di Pulau Jawa, sementara indikator pendidikan yang diwakili oleh Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA justru menjadi yang terendah dibandingkan jenjang SD dan SMP. Ketimpangan antar indikator IPM inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*), karena meskipun IPM secara

agregat tinggi, ketidakseimbangan kontribusi tiap komponennya dapat menjadi penyebab belum optimalnya penurunan kemiskinan di daerah tersebut. Selain itu, upaya peningkatan upah minimum setiap tahunnya di wilayah tersebut guna menekan akan kemiskinan ternyata belum mampu menggeser persentase tinggi kemiskinan di wilayah tersebut. Serta ditemukan suatu fenomena menarik lainnya yaitu pada tahun 2023 adanya penurunan pertumbuhan ekonomi yang juga diiringi oleh penurunan angka kemiskinan, meskipun penurunannya tidak signifikan namun kondisi tersebut menjadi suatu gap karena adanya kesenjangan antara teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan namun pada kondisi nyata di tahun 2023 tidak demikian.

Sehingga dari uraian tersebut peneliti mendapatkan ketertarikan untuk melakukan penelitian secara komprehensif terhadap kondisi kemiskinan di Provinsi DIY dengan tujuan untuk mengidentifikasi dampak faktor-faktor yang menurut teori dan penelitian sebelumnya berdampak dalam penurunan tingkat kemiskinan. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis yang lebih spesifik terhadap indikator pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari variabel IPM. Dalam penelitian ini, menambahkan variabel pendidikan, kesehatan, dan upah minimum sebagai faktor yang dianalisis bersama pertumbuhan ekonomi untuk melihat pengaruhnya secara simultan terhadap kemiskinan. Adanya keterbaruan penelitian ini yaitu dengan fokus pada analisis pendidikan dengan indikator angka partisipasi murni (APM) jenjang SMA sebagai bentuk kebaruan indikator variabel dari penelitian sebelumnya, karena indikator APM lebih spesifik dalam menggambarkan kondisi pendidikan di suatu wilayah. Selain itu, penelitian ini menggunakan data tingkat kabupaten/kota di Provinsi DIY, sehingga mampu

memberikan gambaran yang lebih rinci dan kontekstual mengenai pengaruh variabel tersebut terhadap tingkat kemiskinan. Serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial ekonomi terkini di Provinsi DIY, sehingga hasil yang diperoleh diharapkan dapat mencerminkan dinamika perubahan yang terjadi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan tepat sasaran. Maka, peneliti menentukan judul penelitian yaitu “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan uraian latar belakang tersebut, perumusan masalah yang akan menjadi dasar kajian penelitian adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah terdapat pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
5. Apakah terdapat pengaruh secara bersama pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Untuk menganalisis pengaruh secara bersama pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat

Mengacu pada tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini sebagai bentuk sarana untuk pengembangan literatur pada kajian ilmu ekonomi khususnya terkait kemiskinan dan selain itu juga berkontribusi untuk membantu peneliti maupun akademisi memahami bagaimana variabel-variabel ekonomi dan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan upah minimum memengaruhi kemiskinan, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi empiris dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta menjadi dasar perumusan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam

merumuskan kebijakan terkait penurunan tingkat kemiskinan yang lebih efektif.